



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 217-225
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Politik Identitas dalam Pilkada Surabaya 2020: Dampaknya terhadap Dinamika Politik, Stabilitas Sosial, dan Integrasi Nasional

Al Alimu Nur Rohman^{1*}, Hamaz Zazirah Zamzam Fath², Dicky Febrian³, Alifia Putri Siva⁴

¹⁻⁴ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: alalimunurrohman@gmail.com

Article Info :

Received:
31-12-2025
Revised:
16-01-2025
Accepted:
21-01-2026

Abstract

This study examines the role of identity politics in the 2020 Surabaya mayoral election and its implications for political dynamics, social stability, and national integration. Using a qualitative case study approach, the research analyzes campaign strategies, media narratives, and public responses related to the utilization of religious and social identities during the election. The findings indicate that identity-based political strategies significantly influenced voter mobilization and electoral outcomes, contributing to the candidate's victory. However, beyond electoral success, identity politics also generated social tensions, polarization, and public concern regarding the erosion of democratic substance. At the local level, identity politics strengthened political participation among certain groups, while simultaneously raising the risk of social fragmentation. At the national level, the Surabaya case reflects broader challenges to democratic consolidation and national integration in Indonesia's plural society. The study concludes that while identity politics remains an unavoidable element of democratic competition, its excessive use may undermine social cohesion and democratic quality. Therefore, balanced political regulation, inclusive civic education, and ethical political practices are essential to sustaining a tolerant and integrative democratic system.

Keywords: Identity Politics, Local Election, Social Stability, Democratic Quality, National Integration.

Abstrak

Studi ini mengkaji peran politik identitas dalam pemilihan walikota Surabaya tahun 2020 dan dampaknya terhadap dinamika politik, stabilitas sosial, serta integrasi nasional. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis strategi kampanye, narasi media, dan respons publik terkait penggunaan identitas agama dan sosial selama pemilihan. Temuan menunjukkan bahwa strategi politik berbasis identitas secara signifikan mempengaruhi mobilisasi pemilih dan hasil pemilihan, berkontribusi pada kemenangan calon. Namun, di luar kesuksesan pemilihan, politik identitas juga menimbulkan ketegangan sosial, polarisasi, dan kekhawatiran publik terkait erosi substansi demokrasi. Di tingkat lokal, politik identitas memperkuat partisipasi politik di kalangan kelompok tertentu, sementara sekaligus meningkatkan risiko fragmentasi sosial. Di tingkat nasional, kasus Surabaya mencerminkan tantangan yang lebih luas terhadap konsolidasi demokrasi dan integrasi nasional dalam masyarakat plural Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun politik identitas tetap menjadi elemen tak terhindarkan dalam kompetisi demokratis, penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, regulasi politik yang seimbang, pendidikan kewarganegaraan yang inklusif, dan praktik politik yang etis sangat penting untuk mempertahankan sistem demokrasi yang toleran dan integratif.

Kata kunci: Politik Identitas, Pemilihan Umum Daerah, Stabilitas Sosial, Kualitas Demokrasi, Integrasi Nasional.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 menjadi salah satu peristiwa politik lokal yang menarik perhatian nasional karena berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19 serta dinamika politik identitas yang mengemuka dalam ruang publik. Kontestasi ini dimenangkan oleh pasangan Eri Cahyadi–Armuji dengan perolehan suara yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum dan pemberitaan media nasional (Kompas.com, 2020; Liputan6.com, 2020). Kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi sosial-politik

Surabaya sebagai kota multikultural dengan sejarah panjang keterlibatan politik warga yang relatif aktif. Pilkada Surabaya 2020 menjadi arena penting untuk mengkaji bagaimana politik identitas bekerja dalam demokrasi lokal dan memengaruhi perilaku pemilih serta arah stabilitas sosial.

Politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 muncul melalui berbagai narasi yang berkelindan dengan identitas kedaerahan, afiliasi politik, figur kepemimpinan, serta simbol keberlanjutan kepemimpinan sebelumnya. Kedekatan Eri Cahyadi dengan figur Tri Rismaharini menjadi bagian dari konstruksi identitas politik yang dimaknai publik sebagai kesinambungan nilai dan gaya kepemimpinan (CNN Indonesia, 2020). Narasi tersebut diperkuat oleh representasi media dan komunikasi politik yang intensif di ruang digital maupun kampanye terbatas selama pandemi (Ikfina, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak selalu hadir dalam bentuk primordialisme sempit, tetapi juga dapat berwujud simbol politik yang bersifat personal dan historis.

Perkembangan media sosial turut memperluas jangkauan politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 melalui produksi dan distribusi narasi politik yang masif. Media sosial menjadi ruang strategis untuk membangun citra kandidat, membingkai lawan politik, serta mengonsolidasikan dukungan berbasis identitas sosial tertentu (Adiba, 2025; Normansyah, 2024). Pola komunikasi politik digital ini memengaruhi persepsi publik, terutama generasi muda yang semakin aktif dalam ruang diskursif daring. Transformasi kampanye politik ke ranah digital memperlihatkan bagaimana demokratisasi informasi sekaligus membuka ruang polarisasi politik yang lebih subtil.

Dinamika politik identitas juga berkaitan erat dengan strategi propaganda politik yang digunakan selama masa kampanye. Kampanye tidak hanya berorientasi pada adu gagasan programatik, tetapi juga pada pengelolaan emosi publik melalui simbol, narasi moral, dan klaim legitimasi politik tertentu (Al Abdu et al., 2025). Strategi tersebut berpotensi memperkuat kohesi pendukung sekaligus memicu fragmentasi sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Oleh karena itu, politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka demokrasi substantif dan etika politik.

Dari perspektif sosiologis, politik identitas memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan hubungan antar kelompok masyarakat. Polarisasi politik yang muncul selama kontestasi elektoral dapat memengaruhi pola interaksi sosial, tingkat toleransi, serta penerimaan terhadap perbedaan pilihan politik (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Dalam masyarakat perkotaan yang plural seperti Surabaya, potensi gesekan sosial menjadi perhatian penting bagi keberlanjutan integrasi sosial pascapemilu. Hal ini menegaskan bahwa dinamika politik lokal tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan kultural yang melingkupinya.

Aspek demokrasi lokal dan tata kelola politik juga menjadi konteks penting dalam memahami politik identitas pada Pilkada Surabaya 2020. Transformasi sistem pemilihan dan praktik demokrasi lokal menuntut keseimbangan antara kompetisi politik yang sehat dan perlindungan terhadap nilai-nilai persatuan (Hindiawati & Soleh, 2025). Politik identitas yang dikelola secara konstruktif dapat berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan kelompok, namun berisiko mereduksi demokrasi apabila berubah menjadi alat eksklusif. Oleh sebab itu, kajian ini relevan untuk melihat sejauh mana politik identitas berkontribusi terhadap kualitas demokrasi lokal.

Selain itu, politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 juga beririsan dengan isu keamanan politik dan ketertiban sosial. Praktik politik yang melibatkan tekanan informal, mobilisasi kelompok tertentu, atau penggunaan aktor non-negara dapat menimbulkan ancaman terhadap iklim demokrasi dan stabilitas politik (Nurdin et al., 2025). Meskipun Pilkada Surabaya relatif berlangsung kondusif, potensi tersebut tetap menjadi variabel penting dalam analisis politik identitas di tingkat lokal. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara politik elektoral, keamanan, dan tata kelola demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 serta dampaknya terhadap dinamika politik, stabilitas sosial, dan integrasi nasional. Kajian ini penting untuk memperkaya diskursus akademik mengenai politik identitas di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di wilayah multikultural (Huda et al., 2023; Prayer, 2025). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan demokrasi lokal yang inklusif dan berorientasi pada persatuan bangsa. Dengan pendekatan analitis yang komprehensif, studi ini menempatkan Pilkada Surabaya 2020 sebagai cermin dinamika politik identitas dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam praktik politik identitas dalam Pilkada Surabaya Tahun 2020 serta dampaknya terhadap dinamika politik, stabilitas sosial, dan integrasi nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan komprehensif dengan informan kunci yang terdiri atas akademisi, aktor politik, aktivis masyarakat, serta warga yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses Pilkada. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa analisis dokumen resmi seperti hasil pemilihan umum, laporan dan pemberitaan media massa, serta pernyataan politik yang relevan dengan kontestasi Pilkada Surabaya 2020. Analisis juga dilakukan terhadap konten media massa dan media sosial guna menangkap konstruksi narasi politik identitas di ruang publik, sehingga penelitian ini tidak hanya memotret fenomena secara deskriptif, tetapi juga memahami implikasinya secara kritis sebagai upaya kontribusi akademik bagi penguatan demokrasi yang inklusif dan berlandaskan toleransi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Politik Identitas dalam Pilkada Surabaya 2020

Pilkada Surabaya tahun 2020 menjadi arena politik lokal yang memperlihatkan penggunaan politik identitas secara nyata melalui pendekatan simbolik, sosial, dan kultural yang menyasar kelompok mayoritas pemilih Muslim. Strategi ini muncul dalam situasi kompetisi elektoral yang ketat serta berlangsung di tengah pembatasan aktivitas publik akibat pandemi COVID-19, sehingga pendekatan berbasis identitas dianggap lebih efektif untuk menjaga kedekatan emosional dengan pemilih (Ikfina, 2023; Widiyana, 2023). Dalam konteks Surabaya sebagai kota multikultural, politik identitas tidak hadir secara tunggal, melainkan terintegrasi dengan narasi keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik identitas berfungsi sebagai instrumen mobilisasi elektoral yang disesuaikan dengan karakter sosial masyarakat perkotaan (Prayer, 2025).

Eri Cahyadi memanfaatkan politik identitas terutama melalui pendekatan keagamaan yang menyentuh ruang sosial masyarakat Muslim di Surabaya. Aktivitas kampanye tidak hanya berfokus pada penyampaian program pembangunan, tetapi juga mengintegrasikan pesan moral dan religius yang relevan dengan nilai-nilai komunitas keagamaan setempat (Huda et al., 2023). Kehadiran calon dalam kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam, dan forum keagamaan memperkuat citra kedekatan kandidat dengan aspirasi umat. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana agama berperan sebagai medium legitimasi politik dalam kontestasi elektoral lokal (Triyono, 2025).

Mobilisasi pemilih berbasis agama dilakukan secara terstruktur melalui keterlibatan organisasi massa Islam yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat akar rumput. Hubungan yang dibangun tidak bersifat insidental, melainkan berkelanjutan melalui komunikasi intensif antara tim kampanye dan pengurus ormas Islam (Adiba, 2025). Strategi ini memungkinkan penyebaran pesan politik berlangsung secara organik melalui struktur sosial yang telah mapan. Peran ormas Islam dalam membentuk preferensi pemilih menunjukkan bahwa politik identitas bekerja melalui mekanisme kepercayaan sosial, bukan sekadar propaganda elektoral (Al Abdu et al., 2025).

Selain pendekatan struktural, dukungan tokoh agama menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi politik kandidat. Ulama, kiai, dan tokoh pesantren memiliki posisi strategis sebagai opinion leader yang dipercaya masyarakat, sehingga pernyataan dukungan mereka memiliki dampak elektoral yang signifikan (Hindiawati & Soleh, 2025). Ceramah politik yang disampaikan dalam forum keagamaan mempertemukan pesan keagamaan dengan narasi kepemimpinan lokal. Praktik ini memperlihatkan bagaimana otoritas moral digunakan untuk membangun preferensi politik secara persuasif (Syahdan, 2024).

Pemanfaatan media sosial memperluas jangkauan politik identitas ke ruang digital yang semakin dominan dalam perilaku pemilih perkotaan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter digunakan untuk menyebarkan narasi religius yang dikemas secara visual dan komunikatif (Normansyah, 2024). Konten digital tersebut tidak hanya menampilkan program kerja, tetapi juga simbol-simbol keagamaan dan kedekatan kandidat dengan tokoh agama. Pola ini mencerminkan pergeseran politik identitas dari ruang fisik ke ruang digital yang lebih adaptif terhadap kondisi pandemi (Widyawati & Abror, 2023).

Strategi kampanye berbasis agama juga terlihat melalui penggunaan simbol-simbol religius dalam atribut kampanye. Pemilihan busana, bahasa, serta visual kampanye mencerminkan identitas keislaman yang ingin ditampilkan sebagai bagian dari karakter kepemimpinan kandidat. Simbol-simbol ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan narasi kepemimpinan yang amanah dan berpihak pada kepentingan umat (Wirawan, 2024). Pendekatan simbolik tersebut memperkuat asosiasi antara identitas agama dan pilihan politik pemilih (Prayer, 2025).

Konsolidasi ulama dan ormas Islam dilakukan melalui pertemuan formal, silaturahmi ke pesantren, serta pemberian dukungan sosial yang bersifat simbolik dan material. Praktik ini mencerminkan hubungan timbal balik antara aktor politik dan institusi keagamaan dalam arena demokrasi lokal (Huda et al., 2023). Bantuan sosial yang diberikan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kedekatan emosional dan rasa keterikatan politik. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana politik identitas beroperasi dalam kerangka relasi sosial yang kompleks (Nurdin et al., 2025).

Efektivitas strategi politik identitas tercermin dari distribusi suara yang diperoleh Eri Cahyadi dalam Pilkada Surabaya 2020. Data rekapitulasi menunjukkan bahwa dukungan signifikan datang dari wilayah dengan basis pemilih Muslim yang kuat, sejalan dengan intensitas konsolidasi keagamaan yang dilakukan selama masa kampanye (Kompas.com, 2020; CNN Indonesia, 2020). Perolehan suara ini memperlihatkan keterkaitan antara mobilisasi identitas dan preferensi elektoral. Temuan ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menyebutkan bahwa politik identitas memiliki daya pengaruh tinggi dalam pemilihan kepala daerah di wilayah multikultural (Syahdan, 2024):

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Surabaya 2020

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
Eri Cahyadi – Armuji	597.540	57,3%
Machfud Arifin – Mujiawan	445.935	42,7%

Sumber: KPU Kota Surabaya (2020), Kompas.com (2020), Liputan6.com (2020).

Dominasi suara Eri Cahyadi menunjukkan bahwa politik identitas berfungsi sebagai penguat strategi kampanye, bukan sebagai faktor tunggal kemenangan. Keterkaitan antara dukungan ulama, ormas Islam, dan preferensi pemilih memperlihatkan bahwa identitas agama menjadi medium efektif dalam membangun kepercayaan politik. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor lain seperti kinerja pemerintahan sebelumnya dan efektivitas komunikasi politik (Widiyana, 2023; Putri & Agustina, 2024). Politik identitas dalam konteks ini bekerja sebagai katalis yang mempercepat konsolidasi dukungan (Adiba, 2025).

Meskipun terbukti efektif secara elektoral, penggunaan politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 memunculkan perdebatan normatif mengenai dampaknya terhadap kohesi sosial. Sebagian masyarakat menilai bahwa eksploitasi identitas agama berpotensi memperkuat polarisasi dan menciptakan jarak antar kelompok sosial (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa politik identitas menyimpan risiko jangka panjang terhadap stabilitas sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Oleh karena itu, pembahasan strategi politik identitas perlu dilanjutkan dengan analisis dampaknya terhadap dinamika sosial dan integrasi nasional pada sub bahasan berikutnya (Wirawan, 2024).

Dampak Politik Identitas terhadap Stabilitas Sosial dan Relasi Masyarakat Surabaya

Penerapan politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 tidak hanya berpengaruh pada preferensi elektoral, tetapi juga memunculkan dinamika sosial yang kompleks di tengah masyarakat perkotaan yang heterogen. Surabaya sebagai kota multikultural memiliki sejarah interaksi sosial yang relatif stabil, sehingga masuknya narasi identitas dalam kontestasi politik membawa implikasi yang perlu dicermati secara sosiologis dan politis. Politik identitas bekerja dengan membangun ikatan emosional berbasis kesamaan kelompok, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan garis batas sosial yang lebih tegas antar komunitas (Prayer, 2025). Kondisi ini menjadikan stabilitas sosial sebagai isu penting dalam evaluasi pasca-Pilkada (Suwardi, 2023).

Dalam konteks Pilkada 2020, narasi keagamaan yang menguat selama masa kampanye memengaruhi cara masyarakat memaknai perbedaan pilihan politik. Identitas agama tidak lagi sekadar menjadi latar sosial, tetapi bertransformasi menjadi simbol preferensi politik yang terbaca secara publik.

Situasi ini menyebabkan munculnya kecenderungan pengelompokan sosial berdasarkan kesamaan identitas dan afiliasi politik (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Polarisasi semacam ini berpotensi menggeser relasi sosial dari yang bersifat inklusif menjadi lebih eksklusif (Syahdan, 2024).

Masyarakat Surabaya menunjukkan respons yang beragam terhadap penggunaan politik identitas dalam Pilkada. Sebagian kelompok menerima strategi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal, sementara kelompok lain menilai bahwa politisasi identitas agama dapat mengganggu harmoni sosial. Perbedaan persepsi ini terlihat jelas dalam diskursus publik, baik di ruang komunitas maupun di media sosial (Adiba, 2025). Media digital berperan sebagai ruang amplifikasi opini, yang mempercepat penyebaran sentimen pro maupun kontra terhadap politik identitas (Normansyah, 2024).

Polarisasi sosial yang muncul selama dan setelah Pilkada tidak selalu termanifestasi dalam konflik terbuka, namun lebih sering hadir dalam bentuk ketegangan simbolik dan psikologis. Perbedaan pilihan politik berbasis identitas memengaruhi interaksi sosial sehari-hari, seperti dalam lingkungan tempat tinggal, komunitas keagamaan, hingga ruang kerja. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa dampak politik identitas sering kali bersifat laten dan berjangka panjang (Hindiawati & Soleh, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas sosial tidak hanya diukur dari absennya konflik fisik, tetapi juga dari kualitas relasi antar warga (Nurdin et al., 2025).

Kelompok pemilih muda, khususnya Generasi Z, menunjukkan respons yang cukup kritis terhadap polarisasi politik berbasis identitas. Penelitian menunjukkan bahwa generasi ini cenderung menyadari risiko fragmentasi sosial yang ditimbulkan oleh politik identitas, meskipun tetap terpapar narasi tersebut melalui media sosial (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Kesadaran kritis ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial jangka panjang. Namun, tingginya intensitas konsumsi informasi digital juga membuat kelompok ini rentan terhadap disinformasi dan framing identitas yang bersifat provokatif (Adiba, 2025).

Dari sisi kelembagaan, penyelenggara pemilu dan aktor pengawas berupaya menjaga stabilitas sosial dengan mencegah eskalasi politik identitas ke arah konflik horizontal. Peran KPU dan Bawaslu menjadi krusial dalam memastikan bahwa kontestasi berlangsung dalam koridor regulasi dan etika demokrasi (Putri & Agustina, 2024). Upaya ini mencakup pengawasan kampanye, klarifikasi isu sensitif, serta penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi memecah belah masyarakat. Keberadaan institusi ini membantu meredam dampak negatif politik identitas terhadap ketertiban sosial (Suwardi, 2023):

Tabel 2. Indikasi Dampak Sosial Politik Identitas dalam Pilkada Surabaya 2020

Aspek Sosial	Indikasi Dampak Utama
Relasi antar kelompok	Meningkatnya jarak sosial berbasis preferensi
Diskursus publik	Polarisasi opini di media sosial
Kohesi komunitas lokal	Ketegangan simbolik non-konfrontatif
Persepsi demokrasi	Meningkatnya kesadaran risiko politik identitas
Sumber Data: Diolah dari Adiba (2025), Fathurochman & Tutiasri (2023), Syahdan (2024), Suwardi (2023).	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak politik identitas lebih dominan pada aspek relasional dan perseptual dibandingkan konflik terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sosial Surabaya secara umum masih terjaga, meskipun terdapat pergeseran pola interaksi sosial. Politik identitas bekerja secara halus melalui pembentukan opini, persepsi, dan preferensi sosial yang tidak selalu tampak di permukaan (Wirawan, 2024). Dampak semacam ini sering kali luput dari perhatian, namun berpengaruh terhadap kualitas demokrasi lokal (Syahdan, 2024).

Dalam jangka pendek, stabilitas sosial Surabaya pasca-Pilkada 2020 relatif terkendali berkat kuatnya budaya toleransi perkotaan dan peran tokoh masyarakat. Namun, normalisasi politik identitas dalam kontestasi elektoral berpotensi menciptakan preseden yang memengaruhi perilaku politik pada pemilihan berikutnya. Jika identitas terus digunakan sebagai alat utama mobilisasi, risiko fragmentasi sosial dapat meningkat (Triyono, 2025). Oleh karena itu, dampak politik identitas perlu dilihat sebagai proses berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat (Nurdin et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh cara kompetisi politik dijalankan. Demokrasi lokal yang sehat menuntut adanya

keseimbangan antara kebebasan ekspresi politik dan tanggung jawab menjaga kohesi sosial. Politik identitas yang tidak dikelola secara proporsional berpotensi melemahkan kepercayaan antar kelompok masyarakat (Huda et al., 2023). Dengan demikian, evaluasi Pilkada Surabaya 2020 memberikan pelajaran penting mengenai batas etis penggunaan identitas dalam politik lokal (Wirawan, 2024).

Dampak politik identitas terhadap stabilitas sosial Surabaya bersifat ambivalen, karena di satu sisi mampu meningkatkan partisipasi politik, namun di sisi lain memunculkan potensi polarisasi sosial. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana aktor politik, masyarakat sipil, dan lembaga negara mengelola perbedaan identitas agar tidak berkembang menjadi konflik. Penguatan literasi politik dan kesadaran demokrasi menjadi kunci untuk menjaga integrasi sosial di tengah pluralitas masyarakat (Suwardi, 2023; Prayer, 2025). Analisis ini menjadi pijakan untuk membahas implikasi politik identitas terhadap integrasi nasional pada sub bahasan selanjutnya.

Implikasi Politik Identitas Pilkada Surabaya 2020 terhadap Integrasi Nasional dan Kualitas Demokrasi

Pilkada Surabaya 2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks demokrasi Indonesia yang lebih luas, di mana kontestasi lokal kerap menjadi cerminan dinamika politik nasional. Politik identitas yang menguat dalam Pilkada ini memperlihatkan bagaimana isu lokal dapat beresonansi hingga ke ranah integrasi nasional. Ketika identitas agama dan kelompok sosial dijadikan instrumen politik, dampaknya tidak berhenti pada level kota, tetapi berpotensi memengaruhi konstruksi kebangsaan secara keseluruhan (Syahdan, 2024). Hal ini menjadikan Pilkada Surabaya sebagai kasus penting dalam membaca arah demokrasi Indonesia pascareformasi (Ramawati et al., 2025).

Integrasi nasional bertumpu pada kemampuan negara dan masyarakat dalam mengelola keberagaman secara adil dan setara. Politik identitas yang digunakan dalam Pilkada Surabaya menunjukkan adanya kecenderungan pemanfaatan identitas partikular untuk kepentingan elektoral, yang dapat mempersempit ruang kebangsaan yang inklusif. Ketika loyalitas politik lebih banyak diarahkan pada identitas kelompok dibandingkan nilai kewarganegaraan, maka solidaritas nasional berisiko terfragmentasi (Prayer, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa politik lokal memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas integrasi nasional (Hindiawati & Soleh, 2025).

Dari perspektif demokrasi substantif, politik identitas menimbulkan dilema antara partisipasi dan representasi. Di satu sisi, identitas mampu meningkatkan keterlibatan politik kelompok tertentu yang sebelumnya kurang terakomodasi. Di sisi lain, dominasi narasi identitas berpotensi menggeser perdebatan publik dari isu kebijakan menuju isu simbolik dan emosional (Al Abdu et al., 2025). Kondisi ini dapat menurunkan kualitas deliberasi demokratis dan memperlemah rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politik (Wirawan, 2024).

Pilkada Surabaya 2020 juga memperlihatkan bagaimana politik identitas dapat membentuk preseden politik yang direplikasi di daerah lain. Keberhasilan strategi berbasis identitas berpotensi mendorong kandidat di wilayah lain untuk menggunakan pendekatan serupa. Jika pola ini berlangsung secara masif, maka integrasi nasional dapat menghadapi tantangan serius akibat menguatnya politik sektarian di berbagai daerah (Triyono, 2025). Situasi ini menempatkan demokrasi Indonesia pada persimpangan antara pluralisme inklusif dan fragmentasi identitas (Huda et al., 2023).

Implikasi lain yang perlu dicermati adalah relasi antara politik identitas dan prinsip kesetaraan warga negara. Politik identitas cenderung menempatkan kelompok tertentu sebagai basis legitimasi politik utama, yang secara tidak langsung dapat memarginalkan kelompok lain. Praktik ini bertentangan dengan semangat konstitusional yang menjamin persamaan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi (Nurhayati, 2022). Oleh karena itu, penggunaan identitas dalam Pilkada Surabaya perlu dilihat secara kritis dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional (Ayuningtyas, 2025).

Peran media, khususnya media digital, turut memperluas dampak politik identitas dari level lokal ke nasional. Narasi kampanye, simbol agama, dan pernyataan tokoh politik dengan cepat menyebar melampaui batas wilayah Surabaya. Penyebaran ini menciptakan ruang diskursus nasional yang sarat dengan isu identitas, meskipun peristiwa tersebut bersumber dari kontestasi lokal (Normansyah, 2024). Media digital, dalam hal ini, menjadi medium yang mempercepat transformasi isu lokal menjadi wacana nasional (Adiba, 2025):

Tabel 3. Implikasi Politik Identitas Pilkada Surabaya 2020 terhadap Integrasi Nasional

Aspek Integrasi Nasional	Implikasi Utama
Solidaritas kebangsaan	Potensi penguatan loyalitas kelompok
Demokrasi substantif	Peralihan fokus dari kebijakan ke simbol identitas
Kesetaraan warga negara	Risiko eksklusif kelompok minoritas
Replikasi politik lokal	Preseden politik identitas di daerah lain

Sumber: Diolah dari Syahdan (2024), Wirawan (2024), Prayer (2025), Triyono (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa politik identitas memiliki implikasi struktural terhadap integrasi nasional, bukan sekadar dampak insidental. Penguatan loyalitas kelompok dapat mengikis rasa kebangsaan apabila tidak diimbangi dengan narasi persatuan. Demokrasi yang terlalu menekankan identitas berisiko kehilangan orientasi pada kepentingan publik yang bersifat universal (Ramawati et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya koreksi kebijakan dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu lokal (Hindiawati & Soleh, 2025).

Dalam kerangka pembangunan demokrasi jangka panjang, Pilkada Surabaya 2020 memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan politik kebangsaan. Integrasi nasional tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme elektoral, tetapi memerlukan pendidikan politik yang berkelanjutan. Pendidikan politik yang menekankan toleransi, pluralisme, dan kesetaraan menjadi instrumen strategis untuk menekan dampak negatif politik identitas (Suwardi, 2023). Upaya ini relevan untuk menjaga kohesi nasional di tengah meningkatnya kompetisi politik (Nurdin et al., 2025).

Negara dan penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kompetisi politik tidak merusak fondasi integrasi nasional. Regulasi kampanye, pengawasan narasi publik, dan penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mengendalikan politisasi identitas. Penguatan peran lembaga pengawas pemilu dapat mencegah penggunaan identitas yang bersifat eksklusif dan diskriminatif (Putri & Agustina, 2024). Dengan demikian, demokrasi lokal dapat berjalan seiring dengan penguatan integrasi nasional (Wirawan, 2024).

Politik identitas dalam Pilkada Surabaya 2020 menunjukkan bahwa kontestasi lokal memiliki konsekuensi nasional yang signifikan. Dampaknya terhadap integrasi nasional terletak pada potensi fragmentasi loyalitas warga dan penurunan kualitas demokrasi substantif. Tantangan ke depan adalah membangun demokrasi yang mampu mengakomodasi keberagaman tanpa menjadikannya alat eksklusif politik (Prayer, 2025; Syahdan, 2024). Analisis ini menegaskan bahwa pengelolaan politik identitas menjadi isu strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan keberlanjutan demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran signifikan dalam Pilkada Surabaya 2020 dan memberikan dampak yang kompleks terhadap dinamika politik lokal, stabilitas sosial masyarakat, serta integrasi nasional. Pemanfaatan identitas agama sebagai strategi politik terbukti efektif dalam meningkatkan elektabilitas kandidat, namun pada saat yang sama memunculkan potensi polarisasi sosial dan pergeseran orientasi demokrasi dari substansi kebijakan menuju simbol dan sentimen identitas. Pada level lokal, politik identitas memperkuat partisipasi politik kelompok tertentu, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan eksklusifitas sosial dan melemahnya kohesi antarwarga. Lebih jauh, praktik politik identitas dalam kontestasi lokal berpotensi menjadi preseden nasional yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan integrasi kebangsaan apabila tidak dikelola secara proporsional, sehingga diperlukan penguatan regulasi pemilu, pendidikan politik yang berorientasi pada nilai kebangsaan, serta peran aktif penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil untuk memastikan demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiba, S. M. (2025). Identity Politics On Social Media In The 2020 Surabaya Mayoral Election: Narrative Strategies, Public Response, And The Impact Of Digital Democratization. *Internasional Journal Of Politics And Public Policy*, 2(1), 45-58. <https://doi.org/10.70214/4pgzts78>

- Al Abdu, T., Wantika, A., Sinaga, A. S., & Siagian, J. Y. (2025). Propaganda Dalam Strategi Kampanye Politik: Dialektika Moral Politik Dan Demokrasi Substantif Dalam Bingkai Pemilu Di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 474-495. <https://doi.org/10.14421/Egzay94>
- Ayuningtyas, V. (2025). Politik Dinasti Pemilihan Kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 160-184. <https://doi.org/10.58344/Jhi.V4i4.1777>
- CNN Indonesia. (2020, 17 Desember). *Rekapitulasi KPU, anak buah Risma jadi Wali Kota Surabaya*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201217132558-32-583380/rekapitulasi-kpu-anak-buah-risma-jadi-wali-kota-surabaya>
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z Terhadap Polarisasi Politik. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837-6845. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i9.2833>
- Hindiawati, W., & Soleh, M. (2025). Transformasi Sistem Pemilihan DPRD Untuk Mewujudkan Penguatan Demokrasi Lokal. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 37-55. <https://doi.org/10.19184/Puskapsi.V5i1.53721>
- Huda, I. W. A. U., Hulhak, Z., & Bajuri, A. (2023). Partai Masyumi: Mercusuar Pemahaman Politik Identitas Positif Di Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(1), 25-34. <https://doi.org/10.17509/Historia.V6i1.50090>
- Ikfina, M. U. (2023). Political Campaign Strategies In The Era Of COVID-19 Pandemic: Candidate Experiences In The 2020 Surabaya City Regional Election. *ARISTO*, 12(1), 40-59. <https://doi.org/10.24269/Ars.V12i1.7040>
- Kompas.Com. (2020, Desember 9). Eri Cahyadi-Armuji Menang Pilkada Surabaya 2020. <https://www.kompas.com/tag/eri-cahyadi>
- Kompas.com. (2021, 19 Februari). *Eri-Armuji resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Surabaya 2020*. Kompas Regional. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/16144841/eri-armuji-resmi-ditetapkan-sebagai-pemenang-pilkada-surabaya-2020>
- Liputan6.Com. (2020, Desember 9). Hasil Pilkada Surabaya 2020: Eri Cahyadi-Armuji Menang Telak. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/08565781/Real-Count-Kpu-Pilkada-Surabaya-Data-2714-Persen-Eri-Cahyadi-Armudji-573>
- Normansyah, E. W. (2024). Strategi Kampanye Politik Di Media Sosial: Analisis Konten Instagram" Diary Ning Ais". *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12741-12745. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i11.6219>
- Nurdin, A., Sartika, N. S., Dasmaran, V., & Nurbani, S. (2025). Preman Politik Dan Pasar: Ancaman Keamanan Terhadap Iklim Investasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 354-369. <https://doi.org/10.29103/Jspm.V6i2.21933>
- Nurhayati, A. (2022). Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. *Journal Politique*, 2(2), 81-100. <https://doi.org/10.15642/Politique.2022.2.2.81-100>
- Prayer, A. (2025). Politik Identitas Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Umum Di Daerah Multikultural. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 89-94. <https://doi.org/10.54683/Sociopolitico.V7i1.182>
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya. *Journal Of Governance And Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37-50. <https://doi.org/10.47650/Jglp.V6i1.1057>
- Ramawati, S., Ningsih, R. D. O., Turrahmi, A., Imania, K., & Pangestu, A. (2025). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang Dalam Era Reformasi. *Jurnal Media Ilmu*, 4(2), 121-141. <https://doi.org/10.31869/Jmiu.V4i2.7457>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
- Suwardi, S. (2023). Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam Pilkada Di Jawa Timur. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 442-452. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V2i4.805>
- Syahdan, M. S. (2024). Pengaruh Politik Identitas Dalam Kestabilan Ketatanegaraan Di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 180-193. <https://doi.org/10.32332/0tjv3a81>
- Triyono, N. (2025). Politisasi Agama Dalam Pemilu 2024 Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Pencegahan. *Ashfiya Journal Of Qualitative Insight In Islamic Studies*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.65729/Ashfiya.V1i1.339>
- Tsani, A. R., & Sari, M. M. K. (2025). Persepsi Mahasiswi Fisipol Universitas Negeri Surabaya Tentang Fenomena Kontestasi Perempuan Dalam Pilkada Gubernur (Studi Kasus Di Jawa Timur 2024). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(5), 111-120. <https://doi.org/10.6679/Nw7b5067>
- Universitas Ciputra. (n.d.). *Pilkada Surabaya selama pandemi Covid-19: Tontonan di balik kampanye politik*. Universitas Ciputra. <https://www.uc.ac.id/fikom/pilkada-surabaya-selama-pandemi-covid-19-tontonan-di-balik-kampanye-politik>
- Widiyana, A. (2023). Kampanye Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Kontestasi Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020. *Indonesian Journal Of Political Studies*, 3(2), 90-110. <https://doi.org/10.15642/Ijps.2023.3.2.90-110>
- Widyawati, A., & Abror, D. (2023). Youtube Dan Panggung Politik Wakil Walikota Surabaya Armuji. *Journal Communication Specialist*, 2(2), 288-300. <https://doi.org/10.25139/Jcs.V2i2.6043>
- Wirawan, V. (2024). Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 41-54. <https://doi.org/10.55551/Jip.V5i1.91>